

Militerisasi Sekolah di Rusia, Anak-anak Sudah Diajari Perang

MOSKOW (IM)—Sejumlah sekolah di Rusia semakin ter-militerisasi. Taman kanak-kanak (TK) di Pasifik sampai Laut Hitam sudah diajarkan baris-berbaris dan menggunakan seragam.

Sementara itu, anak-anak yang lebih besar diajari cara menggunakan parit, melempar granat, dan menembak dengan amunisi sungguhan. Di sekolah-sekolah di seluruh negeri dan dinas militer, pemerintah Rusia menggaungkan untuk membentuk kelompok sukarela.

Dikutip dari CNN, Minggu (24/9), kurikulum nasional di sana juga diubah dengan menekankan pada narasi pembelaan terhadap tanah air. Dengan kata lain, anak-anak dipersiapkan untuk ikut perang. Militerisasi sekolah negeri di Rusia semakin intensif sejak invasi Rusia ke Ukraina, bukan didorong oleh gelombang perasaan patriotik secara spontan. Menteri Pendidikan Sergei Kravtsov baru-baru ini mengatakan bahwa kini ada sekitar 10.000 klub militer-patriotik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Rusia. Seperempat juta orang di antaranya mengambil bagian dalam kegiatan mereka.

Klub-klub ini merupakan bagian dari upaya multi-cabang yang mencakup perombakan radikal terhadap kurikulum sekolah. Ada kelas wajib tentang nilai-nilai militer-patriotik; buku-buku sejarah yang diperbarui menonjolkan kemenangan militer Rusia.

Pada bulan Agustus, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang memperkalkan mata pelajaran wajib baru di sekolah, yakni "Dasar-Dasar Keamanan dan Pertahanan Tanah Air". Kementerian Pendidikan kemudian mempromosikan kursus-kursus sebagai bagian dari inisiatif ini yang mencakup kunjungan ke unit-unit militer.

Beberapa di antaranya permainan olahraga militer, pertemuan dengan personel militer dan veteran, dan kelas-kelas tentang

drone. "Siswa sekolah menengah juga akan diajari untuk menggunakan peluru tajam di bawah bimbingan perwira atau instruktur unit militer yang berpengalaman secara eksklusif di garis tembak," kata kementerian pendidikan.

Program tersebut sedang diuji tahun ini dan akan diperkenalkan pada tahun 2024. Program tersebut dirancang untuk menanamkan pada siswa terkait pemahaman dan penerimaan terhadap estetika seragam militer, ritual militer, dan tradisi tempur.

Hal tersebut diketahui dari dokumen Kementerian Pendidikan yang ditemukan oleh outlet media independen Rusia, Important Stories. Sejarah modern juga sedang ditulis ulang. Buku teks standar, "Sejarah Rusia", kini menampilkan Jembatan Krimca di sampulnya dan bab baru yang dikhususkan untuk sejarah terkini Ukraina.

Ada bagian yang berjudul "Pemalsuan sejarah", "Kebangkitan Nazisme", "Neo-Nazisme Ukraina", dan "Rusia adalah negara pahlawan". Putin berulang kali secara keliru menggambarkan invasi Rusia ke Ukraina sebagai "misi khusus" untuk melindungi penutur bahasa Rusia dari genosida yang dilakukan oleh "neo-Nazi".

Buku ini tampaknya dirancang untuk membangkitkan rasa duka historis di kalangan anak-anak Rusia dan memaparkan perjuangan eksistensial demi kelangsungan hidup negara tersebut.

Narasi itu sebenarnya sudah menjadi tema umum di media pemerintah yang disebarluaskan setiap hari ke ruang keluarga di seluruh negeri. Presiden Putin secara pribadi memimpin kampanye untuk menanamkan patriotisme ke sekolah-sekolah Rusia.

Sementara itu, sebuah survei yang dilakukan CNN terhadap media lokal dan sosial di Rusia menemukan bahwa anak-anak berusia tujuh atau delapan tahun telah menerima pelatihan dasar militer. ● **gul**

PM Netanyahu Ungkap Perdamaian Bersejarah Israel dan Arab Saudi Tinggal Hitungan Bulan

NEW YORK (IM)—Israel berada di ambang terobosan bersejarah yang akan memunculkan kesepakatan damai dengan Arab Saudi. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu saat wawancara dengan media Amerika Serikat (AS) Fox News, Sabtu (23/9). Namun, Netanyahu tak menguraikan jalur yang jelas mengenai hambatan besar yang dihadapi oleh kesepakatan tersebut.

Netanyahu mengatakan kepada Fox News, "jendela kesempatan" untuk kesepakatan dengan Arab Saudi adalah "beberapa bulan mendatang". Ia menekankan, "jika kami tidak mencapainya dalam beberapa bulan mendatang, kita mungkin akan menundanya selama beberapa tahun," kata Netanyahu seperti dilaporkan oleh Associated Press, Minggu (24/9).

Saat sebelumnya berpidato di Majelis Umum PBB, Netanyahu mengatakan, tidak lagi ragu akan perdamaian tersebut.

"Tidak diragukan lagi Perjanjian Abraham membawa zaman perdamaian baru. Tetapi saya percaya kita berada di ambang terobosan yang lebih dramatis, perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi," kata Netanyahu menyebut perjanjian bersama antara Israel, Uni Emirat Arab, dan AS pada 2020.

Perjanjian itu menandai normalisasi hubungan publik pertama antara sebuah negara Arab dan Israel sejak Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994. "Perdamaian antara Israel dan Arab Saudi akan menciptakan Timur Tengah baru yang sesungguhnya," imbuh Netanyahu.

Netanyahu menyampaikan nada optimistis sepanjang pidatonya yang berlangsung sekitar 25 menit dan menggunakan alat peraga visual. Dia menampilkan peta yang kontras yang menunjukkan isolasi Israel pada saat penciptaannya pada tahun 1948 dan enam negara yang kini menjalin hubungan normal dengan Israel, termasuk empat negara yang melakukannya pada tahun 2020 dalam apa yang disebut Abraham Accords atau Perjanjian Abraham.

Ada beberapa hambatan di jalan menuju kesepakatan seperti itu, termasuk tuntutan Arab Saudi terhadap kemajuan dalam pembentukan negara Palestina, yang sulit dijual bagi pemerintahan Netanyahu, yang paling religius dan nasionalis dalam sejarah Israel.

Arab Saudi juga mencari pakta pertahanan dengan AS dan ingin bantuan dalam membangun program nuklir sipil mereka sendiri, yang menimbulkan ketakutan akan perlombaan senjata dengan Iran.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan dalam wawancara dengan Fox News pekan ini bahwa

kedua belah pihak semakin mendekati kesepakatan, tanpa memberikan banyak detail tentang negosiasi yang dipimpin oleh AS. Dia menolak untuk menjelaskan apa yang pastinya dicari Arab Saudi untuk Palestina.

Netanyahu mengatakan Palestina "dapat sangat diuntungkan dari perdamaian yang lebih luas," seraya mengatakan, "Mereka harus menjadi bagian dari proses tersebut, tetapi mereka tidak boleh memiliki hak veto atas proses tersebut."

Pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina terhenti lebih dari satu dekade yang lalu, dan kekerasan meningkat selama setahun setengah terakhir ini, dengan Israel sering melakukan serangan militer di Tepi Barat yang diduduki dan warga Palestina menyerang warga Israel. Pemerintahan Netanyahu menyetujui ribuan rumah pemukiman baru di Tepi Barat, yang dikuasai Israel dalam perangnya tahun 1967 dan yang diinginkan oleh Palestina sebagai bagian utama dari negara masa depan mereka.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang berbicara di Majelis Umum pada hari Kamis, tidak mengacu secara langsung pada upaya mencapai kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi. Tetapi dia mengulangi pentingnya konflik Israel-Palestina, yang semakin memburuk sejak Perjanjian Abraham ditandatangani.

"Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat berlangsung di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak nasional mereka yang penuh dan sah adalah keliru," kata Abbas.

Netanyahu sering tampak menikmati menggunakan podium Majelis Umum untuk mencela musuh Israel.

Dia terkenal menunjukkan gambar bom kartun pada tahun 2012 untuk menggambarkan penyempurnaan pengayaan uranium Iran. Pada tahun 2020, dia mengklaim Hezbollah menyimpan peledak di dekat bandara Beirut, yang mendorong kelompok militan yang bersekutu dengan Iran mengutar kunjungan segera oleh jurnalis, yang melihat mesin berat tetapi tidak ada senjata.

Peta yang dia pegang tahun ini tidak merujuk pada Tepi Barat, Gaza, atau Yerusalem Timur, wilayah yang dikuasai Israel pada tahun 1967 yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan mereka. Peta itu tampaknya menunjukkan Israel mencakup ketiganya. Ruang sidang sebagian besar kosong selama pidato Netanyahu, meskipun ada sekelompok pendukung Netanyahu yang bertepuk tangan beberapa kali selama pidatonya. Para pendemo dan pendukung Netanyahu berdemo di seberang jalan dari markas besar PBB. ● **ans**



PAMERAN TIONGKOK-ARAB KE-6

Pengunjung yang menyaksikan pameran energi bersih di Pameran Tiongkok-Arab Serikat keenam di Yinchuan, Daerah Otonomi Ningxia Hui, Tiongkok barat laut, Sabtu (23/9). Pameran ini juga mengadakan acara untuk mempromosikan transformasi energi rendah karbon dan memperkuat kerja sama teknis antar negara.

PBB Sebut Potensi Konflik Perpecahan Dunia Semakin Meningkat

Sekjen PBB mendesak pemimpin dunia untuk mengambil tindakan tangani perpecahan.

NEW YORK (IM)— Pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) tahun lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan peringatan global mengenai kelangsungan umat manusia dan Bumi.

Tahun ini, alarm berbunyi lebih keras dan lebih menakutkan, dengan pesan lebih mendesak untuk sadar dan ambil tindakan sekarang juga.

Dalam penilaian Guterres, manusia semakin dekat dengan perpecahan besar. Konflik, kudeta, dan kekacauan sedang meningkat. Krisis iklim semakin memuncak. Perpecahan semakin mendalam antara kekuatan militer dan ekonomi, yaitu negara-negara Utara yang lebih kaya dan negara-negara Selatan, Timur, dan Barat yang lebih miskin.

Guterres sudah sering berbicara mengenai semua masalah ini. Namun tahun ini, dia berpidato kepada

para pemimpin lebih keras dan bahkan lebih mendesak. Melihat pidato-pidato kenegaraannya sebelumnya, tampak jelas bahwa dia telah menuju ke arah ini selama beberapa waktu ke belakang.

Dalam pidato pertama Guterres di hadapan para pemimpin dunia pada 2017 setelah memimpin PBB yang beranggotakan 193 negara, dia menyebut bahaya nuklir sebagai ancaman global utama. Dua tahun kemudian, dia memperingatkan dunia akan terpecah menjadi dua, dengan Amerika Serikat (AS) dan Cina menciptakan persaingan dalam internet, mata uang, perdagangan, peraturan keuangan.

"Dan strategi geopolitik dan militer mereka yang tidak menguntungkan," ujar Guterres mendesak tindakan tegas untuk mencegah perpecahan besar.

Lalu muncullah pandemi Covid-19 pada awal 2020.

Respons global yang diserukan Guterres tidak pernah terjadi, negara-negara kaya mendapat vaksin, sementara negara-negara miskin dibiarkan menunggu.

Pada pertemuan para pemimpin tahun lalu, pesannya hampir sama mengerikannya dengan pesan pekan ini. "Dunia kita berada dalam bahaya dan lumpuh. Kita terjebak dalam disfungsi global yang sangat besar," ujar Guterres.

Tahun ini, pesan sekjen PBB itu kepada para presiden dan perdana menteri, raja, dan menteri yang berkumpul di aula Majelis Umum yang luas sangatlah jelas dan tegas. "Kami tampaknya tidak mampu untuk bersatu memberikan tanggapan," kata Guterres.

Inti dari banyak pidato Guterres pekan ini adalah masa depan PBB. Lembaga ini dibentuk segera setelah Perang Dunia II untuk menyatukan negara-negara dan menyelamatkan generasi masa depan dari perang. Namun di dunia abad ke-21 yang semakin saling terhubung dan semakin terpecah belah, bagi Guterres, PBB harus tetap bisa relevan.

Perang Dingin menampilkan dua negara adidaya, yaitu

AS yang kapitalis dan Uni Soviet yang komunis. Ketika rezim ini berakhir, terdapat periode singkat unipolaritas yang didominasi AS setelah pecahnya Uni Soviet dan pembubarannya menjadi Rusia yang dominan dan bekas republik-republik yang lebih kecil.

Kini negara-negara tersebut bergerak menuju dunia multipolar yang lebih kacau. Kondisi ini, menurut kata Guterres, menciptakan peluang-peluang baru bagi berbagai negara untuk memimpin.

Tapi argumen utama Guterres berakar pada sejarah. Dia mengatakan, hal ini mengajarkan bahwa dunia yang memiliki banyak pusat kekuatan dan sekelompok kecil negara tidak akan mampu menyelesaikan tantangan yang dihadapi semua negara.

Kondisi ini alasan diperlukan institusi global yang kuat. "Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah satu-satunya forum di mana hal ini dapat terjadi," ujarnya.

Pertanyaan besar yang kini menjadi fokus Guterres adalah apakah sebuah institusi yang lahir pada 1945 dapat dilengkapi dan diperbarui un-

tuk mengatasi tantangan saat ini. "Saya tidak punya ilusi. Reformasi adalah persoalan kekuasaan. Saya tahu ada banyak kepentingan dan agenda yang bersaing," ujarnya.

"Tapi alternatif terhadap reformasi bukanlah status quo. Alternatif terhadap reformasi adalah fragmentasi lebih lanjut. Ini adalah reformasi atau perpecahan," kata Guterres.

Inilah teka-teki yang ada di benak sekjen PBB, apakah 193 negara dengan agenda yang saling bersaing melakukan reformasi besar-besaran? Untuk menghadapi tantangan ini, Guterres telah meminta para pemimpin dunia untuk menghadiri "KIT Masa Depan" pada pertemuan global PBB September mendatang.

Tahun mendatang dapat digunakan untuk merundingkan "Pakta untuk Masa Depan". Pada pertemuan 21 September 2023, Guterres mengatakan kepada para menteri, bahwa perjanjian tersebut mewakili janji untuk menggunakan semua alat yang dimiliki di tingkat global untuk menyelesaikan masalah, sebelum masalah tersebut membebani. ● **ans**

PM Baru Thailand Berjanji Akhiri Penggunaan Bebas Ganja dalam 6 Bulan

BANGKOK (IM)— Pemimpin Thailand pekan ini berjanji untuk membatasi penggunaan ganja untuk tujuan medis setelah ribuan toko ganja dibuka di seluruh negeri sejak negara tersebut menjadi yang pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja pada 2022.

Pemerintah akan berusaha untuk "memperbaiki" kebijakan ganja dan maraknya pertumbuhan apotik yang menjual ganja secara bebas dalam jangka waktu enam bulan, kata Perdana Menteri Srettha Thavasin seperti dikutip dari Bloomberg Television di New York pada Minggu (24/9). "Undang-undang tersebut perlu ditulis ulang," katanya sebagaimana dilansir Bloomberg.

"Itu perlu diperbaiki. Kita bisa mengaturnya hanya untuk penggunaan medis," katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada jalan tengah untuk penggunaan rekreasi.

Meskipun Srettha mengatakan ada kesepakatan luas di antara 11 partai koalisi yang dipimpinnya mengenai perlunya membatasi penggunaan ganja, namun bagaimana tepatnya pemerintahannya akan melanjutkan masih belum jelas.

Partai Pheu Thai yang dipimpinnya mempromosikan kampanye garis keras anti-narkoba menjelang pemilu Mei dan berjanji untuk membatalkan kebijakan penting yang mendekriminalisasi ganja.

Saat ini mereka berkoalisi dengan Partai Bhumjaithai yang dipimpin oleh Anutin Charnvirakul, yang telah berjanji untuk terus melanjutkan rencana untuk memperkalkan kembali RUU ganja di Parlemen yang berupaya pemantauan yang lebih ketat terhadap industri ganja tetapi menentang pengklasifikasian

tanaman tersebut sebagai obat lagi.

Kekosongan peraturan yang terus berlanjut, menyusul langkah deklasifikasi ganja sebagai narkotika, telah menyebabkan menjamurnya hampir 6.000 apotik di seluruh Thailand.

Mereka menjual segala sesuatu mulai dari pucuk ganja hingga ekstrak minyak yang mengandung kurang dari 0,2 persen tetrahydrocannabinol — senyawa psikoaktif yang memberikan sensasi "tinggi" kepada penggunanya.

Petani Thailand juga diperbolehkan menanam ganja secara bebas setelah mendaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan negara tersebut. Pemilik apotek lokal juga mengeluhkan impor yang tidak terkendali dan harga yang tertekan.

Industri ganja tidak terpengaruh oleh langkah untuk menerapkan kembali kontrol tersebut. Manfaat medis dari ganja telah mengaburkan batas antara penggunaan ganja untuk kesehatan dan rekreasi, sehingga secara efektif membuat larangan penggunaan ganja di waktu senggang menjadi tidak mungkin dilakukan, kata Poonwatt Wangpatravanich, presiden Asosiasi Ganja Phuket.

"Peraturan yang lebih banyak akan lebih baik karena kita tidak menginginkan kebebasan untuk semua orang," katanya. "Ganja akan tetap ada, namun statusnya masih belum jelas."

Mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika, dan bukannya mengatur industri ganja, akan berisiko mendorong penggunaan ganja untuk keperluan rekreasi secara sembunyi-sembunyi karena kontrolnya akan semakin berkurang, kata Rattapon Sanrak, pendiri kelompok advokasi ganja Highland Network. ● **gul**

Iran Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Djibouti

TEHERAN (IM)— Iran mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Djibouti, lebih dari tujuh tahun setelah Djibouti bergabung dengan negara-negara regional lainnya dalam memutuskan hubungan dengan Teheran demi mendukung Arab Saudi.

Keputusan negara strategis di Tanduk Afrika itu terjadi beberapa bulan setelah Iran yang didominasi Syiah dan Arab Saudi yang mayoritas Sunni menjalin kembali hubungan berdasarkan kesepakatan yang ditengahi China yang diumumkan pada Maret.

"Hari ini, Iran dan Djibouti mengumumkan dimulainya kembali hubungan diplomatik melalui pernyataan resmi," kata Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dalam posting di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, sebagaimana dilansir

dari VOA Indonesia.

Langkah tersebut menyusul pertemuan Amir-Abdollahian dengan rekannya dari Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, di New York, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.

Djibouti memutuskan hubungan dengan Teheran pada Januari 2016 setelah terjadinya serangan terhadap misi Saudi sebagai protes atas eksekusi ulama Syiah terkemuka Nimr al-Nimr di Riyadh. Sekutu-sekutu Saudi lainnya termasuk Bahrain juga memutuskan hubungan sebagai bentuk solidaritas, setelah Riyadh memutuskan hubungan dengan Iran.

Menyusul kesepakatan penting dengan kerajaan Saudi, Iran telah berupaya memperkuat atau memulihkan hubungan dengan negara-negara tetangga Arabnya.

Djibouti, sebuah negara di

Teluk Aden, terletak di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan menampung pangkalan-pangkalan militer dari Tiongkok, Prancis, dan Amerika Serikat (AS).

Negara kecil ini terletak di muara Laut Merah, tepat di seberang Yaman, tempat koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional melawan pemberontak Huthi yang didukung Iran setelah menguasai ibu kota Sanaa.

Pada Kamis, (21/9) malam, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Iran dan Djibouti juga sepakat untuk "mengembangkan lebih lanjut hubungan persahabatan" dan "memperkuat kerja sama di berbagai bidang." ● **tom**



FESTIVAL PANEN PETANI TIONGKOK

Para petani memproses buah anggur yang baru dipetik di Kota Beiling, Kabupaten Xiayi, Provinsi Henan, Tiongkok tengah, pada Sabtu (23/9). Festival panen petani Tiongkok keenam ini dirayakan di seluruh Tiongkok.